

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PUTUSAN MK NO. 60/PUU-XXII/2024 TERHADAP CALON TUNGGAL PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024

Oleh

ALVIN ALYONNI

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dalam mencegah calon tunggal pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan MK, serta pendekatan empiris melalui wawancara dengan narasumber dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan pengamatan terhadap tahapan pencalonan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan analisis data secara kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Putusan MK berlangsung secara bertahap dan adaptif. Pada awal pendaftaran (27–29 Agustus 2024), hanya satu pasangan calon yang mendaftar sehingga berpotensi terjadi calon tunggal. KPU Kabupaten Lampung Timur kemudian mengambil kebijakan perpanjangan masa pendaftaran. Setelah terbit Surat Edaran KPU RI Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 sebagai panduan teknis pasca putusan MK, KPU melakukan verifikasi ulang terhadap dokumen pasangan calon kedua yang sebelumnya dinyatakan belum memenuhi syarat administratif. Verifikasi ulang ini menghasilkan penetapan dua pasangan calon yang memenuhi syarat, sehingga Pilkada Kabupaten Lampung Timur 2024 akhirnya berlangsung secara kompetitif tanpa calon tunggal.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Calon Tunggal, Pilkada, Komisi Pemilihan Umum, Kabupaten Lampung Timur

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 60/PUU-XXII/2024 ON SINGLE CANDIDATES IN THE 2024 REGIONAL HEAD ELECTION OF EAST LAMPUNG REGENCY

By

ALVIN ALYONNI

This study aims to analyze the implementation of Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 in preventing single candidates in the 2024 Regional Head Election of East Lampung Regency.

The research employs a normative juridical approach through literature study of legislation and Constitutional Court decisions, as well as an empirical approach through interviews with sources from the Lampung Provincial General Election Commission and observation of the candidate registration stage. The sampling technique uses purposive sampling with descriptive qualitative data analysis.

The research results show that the implementation of the Constitutional Court Decision proceeded gradually and adaptively. During the initial registration period (August 27–29, 2024), only one candidate pair registered, potentially resulting in a single candidate scenario. The East Lampung Regency General Election Commission subsequently adopted a policy to extend the registration period. Following the issuance of the General Election Commission of the Republic of Indonesia Circular Letter Number 2038/PL.02.2-SD/06/2024 as a technical guideline following the Constitutional Court decision, the Commission conducted re-verification of the documents of the second candidate pair that had previously been declared not to meet administrative requirements. This re-verification resulted in the determination of two qualified candidate pairs, so that the 2024 East Lampung Regency Regional Head Election ultimately proceeded competitively without a single candidate.

Keywords: *Constitutional Court Decision, Single Candidate, Regional Head Election, General Election Commission, East Lampung Regency*